

Solmadapar Cerca Pemprov dan SBY

Pontianak. Memperingati Sumpah Pemuda, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mengkritisi kinerja pemerintah Kalbar dan Presiden SBY. Mereka melakukan long march dari bundaran Untan ke Kantor Gubernur, Jumat (28/10) sekitar pukul 09.00.

Evan dalam pernyataannya mengaku kecewa terhadap kinerja pemerintahan SBY dan Pemprov Kalbar. Selama bekerja mendapatkan raport merah, terutama dalam penegakan hukum yang berjalan di tempat.

"Sedangkan Pemprov Kalbar telah menjadi sarangnya mafia korupsi, terutama di SKPD. Selain itu terhadap kasus korupsi, tidak ada alasan lagi bagi para penegak hukum untuk tidak menunda proses hukum pejabat daerah yang korup," tegas Evan, Humas Solmadapar kepada wartawan di sela-sela demo di depan halaman Kantor Gubernur, Jumat (28/10).

Menurut Evan, telah terjadi kebocoran aset dan anggaran di Pemprov Kalbar Rp156 miliar atau bahkan lebih. Tentunya merugikan daerah, apalagi uang yang bocor begitu besar. Anehnya sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Ironisnya, Gubernur Kalbar sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diam seribu bahasa.

"Seakan-akan ingin menutupi dan melindungi para koruptor. Apalagi telah ada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti salah satu pejabat yang sudah mendapatkan putusan, namun sampai saat ini belum diputus," sesalnya.

Pernyataan Evan tersebut menyusul temuan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap kerugian keuangan pada Pemprov Kalbar sebesar Rp 156 miliar dan temuan nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Jika melihat UU tentang penyidikan dan penyelidikan, Evan juga menyayangkan, ternyata pemberantasan korupsi dikalahkan atas dasar alasan administrasi bernama surat izin presiden. "Terdengar sumbang di tengah kenyarangan komitmen anti korupsi yang selalu dipidatokan presiden," kata Evan.

Parahnya lagi, jajaran pemerintahan di bumi Khatulistiwa masih mempekerjakan para koruptor. Bahkan sampai saat ini masih bekerja dengan jabatan yang sama, meski sudah divonis bersalah. "Seperti kasus pengadaan baju hansip beserta

atribut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kalbar. Miris, kenapa pejabat yang tidak layak masih dipertahankan menduduki jabatan yang jelas-jelas sudah merugikan negara," kesal Evan.

Evan menegaskan, Solmadapar menyatakan sikap bahwa Gubernur Kalbar dan Presiden RI telah mengkhafani Sumpah Pemuda. Gubernur juga dianggap membisu dan para penegak hukum dibungkam. "Selain itu Gubernur harus bertanggungjawab dan harus mengusut tuntas mafia kasus aset dengan anggaran Pemprov. Kami juga menuntut untuk memecat oknum pejabat yang terlibat mafia korupsi di Pemprov dan jangan dijadikan Kalbar sebagai anak haram Indonesia," tegasnya. (jul)